

I Nyoman Sueca

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKAT MUTU PENDIDIKAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKAT MUTU PENDIDIKAN

I Nyoman Sueca

Diterbitkan Oleh:



2020

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKAT MUTU PENDIDIKAN

Hak Cipta © 2020 pada Penulis

I Nyoman Sueca

Editor :

-

Cover Design
T.M. siddiq^(SEFA)

Layout

Rizka Indriani^(SEFA)

Pracetak dan Produksi

CV. Sefa Bumi Persada

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Jl. B. Aceh – Medan, Alue Awe - Lhokseumawe

email: sefabumipersada@gmail.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : 2020

ISBN – 978-623-7648-15-4

1. Hal.81 : 15,8 x 23 cm

I. Judul

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini.

Dalam penulisan Buku ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, masukan serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan penulisan Buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya semoga penulisan Buku ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian, Amin.

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Teori-Teori Yang Relevan	10
2.2.1 Kebijakan Publik	10
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	17
2.2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	20
2.2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	21
2.2.6 Model Implementasi Kebijakan	23
2.2.7 Memahami Proses Implementasi dan Fungsi Analisis ..	24
2.2.8 Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan.....	26
2.3 Program Keluarga Harapan (PKH).....	28
2.4 Mutu Pendidikan	30
2.5 Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data	39
3.4 Teknis Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknis Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.2 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.....	44
4.1.3 Kendala Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z	57

4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z	67
4.2.2 Kendala Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z	73
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik bangsa Indonesia. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan kultural terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyiapkan sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan struktur sosial dalam masyarakat (Susanto, 2006).

Kemiskinan seyogyanya digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan apapun. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses

kesehatan yang terjamin dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Suharto (2009: 131)

Program keluarga harapan (PKH) mulai dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007 yang diluncurkan di Provinsi Gorontalo pada Juli 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini berkesinambungan sampai pada tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan *Millenium* (*Millenium Development Goals* atau MDGs). PKH terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat.

PKH pertama kali diimplementasikan di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbia, Honduras, Jamaica, dan Nikaragua yang dikenal dengan program *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini tergolong berhasil menurunkan angka kemiskinan karena program ini berusaha untuk mengubah perilaku hidup RTSM dengan cara memberikan bantuan tunai untuk membiayai kebutuhan. Akan tetapi penerimaannya mensyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu atau layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita, dan meningkatkan kehadiran sekolah secara rutin/ teratur bagi anak-anak RTSM yang memiliki usia SD-SMP.

Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD / MI / SDLB / Salafiyah Ula/Paket A atau SMP / MTs / SMLB / Salafiyah Wustha / Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan (Biro Humas Departemen Sosial RI, 2012).

Jika ditinjau dari tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RTSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari, efektif sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Akan tetapi sampai saat ini PKH masih belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X khususnya dan Kabupaten Z pada umumnya (Direktorat Jaminan Sosial, 2013 : 9).

Berdasarkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Z Jumlah sarana fasilitas pendidikan menurut tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta berjumlah 12 unit, yang terdiri dari 9 unit sekolah dasar/ sederajat, 2 unit sekolah menengah pertama/ sederajat, dan 1 unit sekolah menengah atas/ sederajat. pembangunan pendidikan nasional tidak akan lepas dari perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat nasional maupun

regional. sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan pendidikan. Dengan keadaan yang terbatas ini maka tidak tertutup kemungkinan penduduk X untuk bersekolah di kecamatan yang lain agar kegiatan wajib belajar terlaksana dengan sempurna. Jumlah guru dan murid SD/ sederajat 1.421.970 SMP/ sederajat 68.765 SMA/ sederajat 45.575 sumber : BPS (Kecamatan X dalam angka 2013 jumlah guru dan murid Kecamatan X tahun 2012 sekolah). Kecamatan X yang beribu kota X Merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Z. Dengan masyarakat yang bermata pencaharian, mayoritas penduduk Kecamatan X bergerak dalam sektor pertanian.

Berdasarkan data dari observasi awal diketahui bahwa jumlah penerima bantuan pendidikan PKH di Kecamatan X adalah 1.262 orang sedangkan jumlah anak didik yang ada adalah usia wajib belajar adalah 15.381 orang, artinya jumlah penerima masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siswa usia wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pendataan kembali (Sumber: Observasi awal di Kecamatan X, 2014)

Jumlah penerima bantuan pendidikan PKH di Kecamatan X pada tahun 2013 adalah 370 KK karena 20 KK tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana PKH, dapat dijumlahkan bahwa jumlah anak penerima PKH berjumlah 350 orang. Untuk tahun 2015 sudah direncanakan penerima PKH sampai wajib belajar 12 tahun mulai dari TK sampai SMA, adapun jumlah bantuan yang diberikan per KK pada tahap I adalah minimal Rp. 125.000,- dan maksimal Rp.625.000,- sedangkan untuk tahap II minimal Rp. 250.000,- dan maksimal Rp. 825.000,- mekanisme pembayaran dana PKH ini

dibagi kedalam 4 tahap, dan jika ditotal maksimal per keluarga mendapat bantuan sebesar Rp. 2.800.000,- /KK meskipun jumlah anggota keluarganya lebih banyak karena itu sudah batas maksimal.

Temuan dilapangan adalah pada kelompok RTSM penerima memiliki perbedaan terkait aset atau kondisi rumah tangganya. Misalnya ada diantara mereka yang kepemilikan asetnya tinggi namun juga ada yang sedikit atau ada yang kondisi rumahnya baik dengan lantai keramik dan dinding tembok namun ada pula yang berdinding bilik, sehingga dirasakan perlu untuk mengklasifikasikan dimana posisi RTSM itu berdasarkan kategori yang lebih bervariasi, sederhana namun mampu melihat dimana posisi RTSM berada.

Adanya program PKH yang digulirkan kepada rumah tangga miskin di daerah Kecamatan X akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga ditunjang dengan jumlah angka masyarakat fakir miskin atau sangat miskin yang berjumlah 649 KK, sedangkan masyarakat miskin berjumlah 399 KK, akan tetapi ada beberapa rumah tangga RTSM yang tidak masuk dalam penerima PKH, secara kondisi fisik rumah lebih membutuhkan dibandingkan penerima PKH yang terdaftar sehingga dikhawatirkan terjadi ketidaktepatan sasaran.

Berdasarkan hasil obsersevasi awal bahwa PKH yang diberikan oleh pemerintah belum meningkatkan mutu bagi pendidikan anak, walaupun pemerintah telah memberikan pendamping kepada anak yang mendapatkan PKH, namun dilapangan belum terlaksanakan dengan baik, pendamping hanya ada pada saat memberikan dana tidak dilakukan secara berkelanjutan untuk mengarahkan para siswa dan siswai giat dalam

belajar dan dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan sekolah bukan untuk kepentingan lainnya.. (Observasi awal, 8 April 2015)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z ?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi focus penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z. Fokus Kajian pada mutu pendidikan
2. Kendala implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z. Fokus kajian pada kendala dalam implementasi Pogram Keluarga Harapan (PKH)

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau menjadi acuan pada penelitian –penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Abdullah (2003) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Republik Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penerima Dana PKH Kecamatan Sarudik Tapanuli Tengah “menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi desa melalui suatu pendekatan *people centred*, dengan cara lebih memberdayakan masyarakat sebagai subjek terutama untuk peningkatan kemampuan disegala bidang kehidupan, kegiatan ini di lakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat setempat.

Kesamaan penelitian Abdullah dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang PKH. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, sedangkan Abdullah lebih pada pemberdayaan PKH.

Slamet Agus Purwanto (2013) dengan judul penelitian Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto mulai seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program semuanya hampir berjalan dengan lancar, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari mampu untuk

merubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik. keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh efektifitas organisasi pelaksana dalam memberi pembelajaran, pendampingan, kemandirian, bagi masyarakat miskin.

Kesamaan penelitian Slamet Agus Putranto dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang PKH. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, sedangkan Slamet Agus Purwanto lebih fokus kemiskinan.

Ika Ernawati (2013) dengan judul penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Selamat Kabupaten Aceh Timur menjelaskan bahwa telah berjalan dengan baik namun belum maksimal, proses implementasi PKH di kecamatan Bukit Selamat Kabupaten Aceh Timur terdapat beberapa tahap yaitu pemilihan dan penetapan peserta PKH, Pertemuan awal (sosialisasi), tahap pembayaran, pembentukan kelompok Ibu ketua kelompok PKH, verifikasi komitmen, penangguhan dan pembatalan, serta proses pengaduan.

Kesamaan penelitian Ika Ernawati dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang PKH. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, sedangkan Ika Ernawati lebih fokus pada proses atau tahapan pelaksanaan PKH.

2.2. Teori-Teori yang Relevan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori yang bisa menjawab hasil penelitian di lapangan dan bisa membantu dalam mencari data, di mana teori yang digunakan yang berhubungan dengan implmentasi kebijakan seperti yang dijelaskan di bawah ini

2.2.1. Kebijakan Publik

Public policy atau kebijakan publik berasal dari kata *public* atau publik atau umum dan *policy* atau kebijakan atau kebijaksanaan. Menurut pandangan James E. Anderson yang di kutip oleh Solichin Wahab (2005: 2), merumuskan kebijakan disamakan dengan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu.

Disamping itu, dari sumber yang sama Carl Friedrich dalam Wahab (2005: 2) menyatakan bahwa: “ kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang dirumuskan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Menurut Suharno (2008: 11). Istilah ‘kebijakan’ akan disepadankan dengan kata ‘policy’. Istilah ini berbeda maknanya dengan kata ‘kebijaksanaan’ (*wisdom*) maupun ‘kebijakan’(*virtues*). Demikian Budi Winarno dan Solichin A. Wahab sebagai mana dikutip oleh Suharno (2008: 11) sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah- istilah lain

seperti tujuan (goal) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Grand design.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti tersebut mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Suharno, 2008: 12).

Menurut Dunn dalam (Subarsono, 2010: 14). ada berbagai kebijakan yang ditentang oleh masyarakat karena bersifat reaktif dan masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Diantaranya kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kebijakan adalah (1) inti permasalahan tidak dikenal, (2) mengalami kelemahan karena ditentang oleh masyarakat, (3) outcomes kebijakan tidak seperti yang diharapkan.

Ujodi dalam Wahab (2005:5-7) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada satu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Definisi tersebut menyimpulkan kebijaksanaan negara punya beberapa ciri tertentu yaitu :

1. Kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dan pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah pada tujuan

tertentu yang dilakukan oleh pejabat negara bukan keputusan berdiri sendiri.

3. Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya pada bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tersebut.
4. Kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Dalam bentuk positif ini kebijaksanaan ini akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi masalah tertentu. Jika dalam bentuk negatif meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak dalam masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan. (Wahab, 2005:5-7)

Dari konsep kebijakan publik yang telah dipaparkan di atas, maka kita temukan karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri yaitu dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Kebijakan publik juga memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaksanaan yang dibuat oleh organisasi swasta.

2.2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan Dwiyanto Indiahono (2009:143)

Implementasi yang merupakan *major* strategis dari proses kegiatan perumusan kebijakan perlu untuk dikupas dalam penelitian ini. Dipandang perlu, karena implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji dalam (Wahab 2007:59) secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab, 2007:59).

Grindle dalam Wahab (2007:63) berpendapat bahwa Implementasi Kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Dalam kaitannya dengan konsep implementasi Wahab (2007:64) secara jelas menyimpulkan "Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden). Bahkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di dalam (Wahab:65) menyatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Anderson dalam (Islamy, 2002:79), dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi yaitu:

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*Unintended Consequences*) baik pada problemnya maupun pada masyarakat.
- b. Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijakan tersebut, biasanya disebut "*externalities*".
- c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- d. Dampak kebijakan terhadap "biaya" langsung atau *direct cost* dari kebijakan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat.

Demikian halnya dengan penelitian ini akan dikaji dan diteliti apakah proses implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perda dan dampak aktual yang timbul sesuai dengan tujuannya, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasinya.

Menurut Suharno (2008: 187) "Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (publik

cervices). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang mereka tidak lakukan”.

Menurut Edward dalam Dunn (2003:89) menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya

1. Komunikasi. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang dilakukannya. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi Resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumberdaya merupakan faktor penting selain dari komunikasi dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan
3. Disposisi. Yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor Seperti: kejujuran, sifat demokratis, dsb. Tanpa disposisi dari implementor yang baik maka kebijakan yang dijalankannya tidak dapat berjalan dengan baik demikian sebaliknya.
4. Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan struktur yang mengimplementasi kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Hogerwerf dan Gunn (dalam Wahab, 2004: 71) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara

sempurna (perfect implementation), diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Pelaksanaan programnya harus tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
3. Paduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang andal
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatutan yang sempurna.

Menurut Awang (2010: 32), proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Kebijakan

yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Adapun konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Nugroho (2003 : 158). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Untuk mengimplemntasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006 : 31-33). Mengemukakan bahwa pada hakikatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Isi program tersebut harus menggambarkan :1) kepentingan yang terpengaruhi oleh program, 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) status pembuat keputusan, 5) siapa pelaksana program, dan 6) sumber daya yang digunakan.

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Nigro dalam Islamy (2004: 24), “pengambilan kebijakan bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah, setiap administrasi dituntut mempunyai keahlian tanggung jawab, kemauan sebagai pembuat kebijakan dengan segala resikonya baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan”.

Menurut Nigro dalam Islamy (2004: 25), “Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
3. Adanya pengaruh sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu”.

Faktor di atas selalu ikut mempengaruhi kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penguasa dan sekaligus sebagai pihak yang memberikan layanan kepada masyarakat.

“Anderson dalam Islamy (2003: 27) melihat adanya beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan yaitu :

1. Nilai politik (*political valvas*) keputusan/kebijakan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai organisasi (*organizing valvas*) keputusan/kebijakan dibuat atas dasar nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*).
3. Nilai pribadi (*personal valvas*) seringkali keputusan/kebijakan dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
4. Nilai kebijakan (*policy valvas*) keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau

pembuatan kebijaksanaan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.

5. Nilai ideologi (*ideological values*) nilai ideologi misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijaksanaan dalam dan luar negeri”.

“Kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan, Nigro dalam Islamy (2004: 28) menyebutkan adanya 7 (tujuh) macam kesalahan umum itu, yaitu:

1. Cara berfikir yang sempit.
2. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu.
3. Terlampau menyederhanakan sesuatu.
4. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang.
5. Keputusan yang dilandasi oleh para konsepsi pembuat keputusan.
6. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan.
7. Keengganan untuk membuat keputusan”.

Dwijowijoto dalam Awang (2010: 36) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi tiga variabel, yaitu: *variable independent*, yaitu mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan, *variable intervening*, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan *variable dependent*, yang melalui lima tahapan yaitu pemahaman, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan revisi. Sedangkan variabel yang mempengaruhi dalam kebijakan meliputi aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,

karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan dari pelaksana.

Cheema dan Rondonelli dalam Awang (2010: 38), Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi, khususnya pada negara-negara berkembang antara lain adalah:

1. Kondisi Lingkungan.
2. Hubungan dalam Organisasi
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
4. Karakteristik dari Agen Implementasi Kebijakan.

Widodo (2001: 200) menyatakan bahwa dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak saja pada pelaksana (implementor), tapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

2.2.4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

“Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2008:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip dalam (Wahab : 2005:65) yaitu :

- a. “Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang

- serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
 - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
 - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
 - e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
 - f. Hubungan saling ketergantungan kecil
 - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
 - h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
 - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
 - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
 - k. mendapatkan kepatuhan yang sempurna”.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

2.2.5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terdapatnya berbagai kendala

seperti yang dikatakan oleh Caiden dalam Islamy (2004: 27) menyebutkan adanya beberapa faktor, yaitu:

- a. "Sulitnya memperoleh informasi yang cukup, kesulitan memperoleh informasi yang benar tentang persoalan yang dihadapi membuat pimpinan sulit untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
- b. Bukti yang sulit disimpulkan, persoalan yang kompleks dihadapi menimbulkan kesulitan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sikap terhadap masalah.
- c. Adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda pula, kepentingan yang beragam membuat pimpinan sulit mengambil keputusan yang bisa membuat semua terwakilkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- d. Dampak kebijakan sulit dikenali, kebijakan yang telah ditetapkan tidak semuanya memberi dampak seperti yang diharapkan, perubahan lingkungan sangat memberi imbas atas keberhasilan pada implementasi kebijakan.
- e. Umpan balik keputusan bersifat sporadis dan proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar".

Kebijakan menjadi hal yang sulit ditentukan oleh seorang pimpinan, sehingga keahlian dalam melihat situasi dan kondisi perlu dimiliki seorang pimpinan, yang membuat pimpinan bisa mengambil kebijakan yang bisa memberi kemajuan bagi organisasi, walau kebijakan yang ditempuh memiliki dampak negatif dalam implementasinya.

2.2.6. Model Implementasi Kebijakan

Membuat kebijakan pemerintah ini merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukanlah kebijakan pemerintah itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah

Menurut Syafiie (2005 : 146). Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, yaitu sebagai berikut di bawah ini :

1. "Model elit Yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
2. Model kelompok yaitu berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan.
3. Model kelembagaan yaitu dengan kelembagaan di sini adalah kelembagaan pemerintah. yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, pemerintah daerah lainnya.
4. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya;
5. Model rasialisme yaitu untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
6. Model inkrementalisme model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian

hambatan seperti waktu, biaya dan tenaga untuk memilih alternatif dapat dihilangkan.

7. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*”.

2.2.7. Memahami Proses Implementasi dan Fungsi Analisis

Menurut Santoso (2010: 125), Secara umum implementasi kebijakan adalah proses dimana formula kebijakan ditransformasikan menjadi produk konkrit kebijakan. Dalam asumsi ideal yang seringkali dipakai sebagai dasar untuk melakukan analisa, implementasi kebijakan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang dinyatakan dalam formula kebijakan, sebagai policy statement, ke dalam policy outcome, yang muncul sebagai akibat dari aktivitas pemerintah.

Untuk mewujudkan kesinambungan antara tujuan kebijakan dan outcome kebijakan perlu adanya sebuah ‘policy delivery system’. Dalam sistem itu, kebijakan diterjemahkan dalam program-program, dan dalam masing-masing program ada instrumen-instrumen yang didesain untuk memastikan bahwa implementasi program-program tersebut secara simultan berkontribusi pada tercapainya tujuan kebijakan.

Karena itu, implementasi akan lebih baik jika dimaknai sebagai: proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis dengan mendayagunakan serangkaian instrumen kebijakan untuk menghasilkan perubahan sosial ke arah yang dikehendaki, yang mencakup pula serangkaian proses negoisasi

antara implementor dengan sasaran kebijakan untuk memastikan tercapainya misi kebijakan. (Santoso, 2002)

Kenyataan menunjukkan bahwa selalu ada kesenjangan antara tujuan yang dinyatakan dalam policy statement dengan outcome yang dihasilkan dari policy implementation membuat sebagian analisis mulai menelaah 'missing-link' dalam analisis implementasi kebijakan yang selama ini dilakukan. Sejak saat itu, analisis implementasi kebijakan mulai bergerak lebih jauh lagi daripada sekedar memandang proses implementasi kebijakan sebagai proses administratif semata. Di sini, analisis mulai mencoba menemukan dan memetakan bagaimana proses implementasi kebijakan memiliki dinamikanya sendiri dan dinamika ini mempengaruhi outcome dari kebijakan yang diimplementasikan.

Salah satu ahli kebijakan publik yang melihat dimensi lain, di samping dimensi teknis administratif, dari proses implementasi ini adalah Grindle. Dinamikan proses implementasi ini menurut Grindle, melibatkan paling tidak dua variabel utama, yaitu policy content dan policy context. Policy content mempengaruhi proses implementasi karena policy content yang dihasilkan melalui proses policy making menentukan apa yang harus di-deliver melalui sebuah kebijakan, perubahan apa yang bakal muncul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan, di mana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan siapa yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Sementara, policy context merepresentasikan lingkungan dimana suatu proses kebijakan, termasuk implementasi berlangsung. Grindle mengidentifikasi elemen dari policy context ini meliputi: kekuatan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik rezim dan institusi; dan kepatuhan dan responsivitas.

Elemen-elemen yang ada di dalam variabel policy context ini merupakan hal-hal yang cenderung diabaikan ketika orang terlalu naif dengan pendekatan teknokratis-administratif, karena diasumsikan bahwa semua orang akan patuh dan tidak ada hal yang kontroversial dengan policy content. Namun dalam kenyataannya, policy content yang tidak kompatibel dengan konteksnya bisa menuai resistensi yang membuyarkan seluruh keputusan kebijakan, bahkan yang paling teknokratis sekalipun. Model ini mengajak para analis untuk memberikan perhatian yang selayaknya pada dimensi policy context.

2.2.8. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn ada dua perspektif umum dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendekatan top – down dan pendekatan bottom – up. Singkatnya, perspektif top-down melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang ditentukan dari atas, berjalan dalam secara konsekual dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan. Implementasi kebijakan dilakukan menurut prosedur dan petunjuk yang ditetapkan dari atas. Perspektif bottom – up melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang inisiatif dan prakteknya di bangun dari bawah. Prosesnya bukanlah sebuah proses yang bersifat konsekual, namun berlangsung dalam proses tawar-menawar yang terjadi terus-menerus antar berbagai aktor kebijakan. Intinya, perspektif ini, alih-alih menekankan pada ketepatan dan pedanticism-teknokratis, lebih mengandalkan pada inisiatif, pengetahuan, dan kemampuan belajar dan beradaptasi dari masyarakat sebagai stakeholders dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Masih mengacu pada Hogwood dan Gunn, ada empat perspektif, yang bersama-sama dengan dua pendekatan di atas, sering digunakan dalam proses maupun analisa implementasi kebijakan, yaitu :

1. Pendekatan Struktural

Analisis yang menggunakan pendekatan ini biasanya memfokuskan analisisnya pada analisis organisasional modern. Di sini sebisa mungkin desain kebijakan dan organisasional dianggap sebagai dua hal yang kurang lebih kongruen.

2. Pendekatan Prosedural

Analisis yang menggunakan perspektif ini akan menekankan pada analisa terkait dengan proses dan prosedur yang tepat, termasuk teknik-teknik yang tepat, untuk mengimplementasikan kebijakan. Analisis yang menggunakan pendekatan ini akan melihat apakah implementasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur.

3. Perspektif Behavioral

Pendekatan ini menekankan pada analisa tentang perilaku manusia terhadap kebijakan. Ini terkait dengan sifat dasar kebijakan sebagai sebuah langkah intervensi. Analisa dengan pendekatan ini biasanya akan ditujukan untuk menciptakan sebuah atmosfer kepercayaan, terutama melalui pengelolaan yang memperlihatkan kepedulian terhadap kepentingan publik.

4. Perspektif Politik

Perspektif ini didasarkan pada asumsi sederhana: implementasi sebuah kebijakan bisa jadi telah direncanakan secara cermat menurut organisasi, prosedur dan manajemen

yang tepat, dan menghasilkan perilaku sebagaimana diharapkan, tetapi jika itu semua mengabaikan realitas kekuasaan, misalnya; kemampuan kelompok-kelompok yang menentang kebijakan tersebut untuk 'mengganggu' kebijakan tersebut, maka kebijakan itu bisa jadi akan gagal. Analisis dengan pendekatan ini biasanya, meskipun tidak selalu, terkait dengan pola-pola kekuasaan antar dan dalam organisasi.

2.3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Untuk lebih jelasnya maka perlu dijelaskan pengertian dan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*. (Pusdiklat Kesos, 2007 : 20).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang

dalam mekanisme pelaksanaannya melibatkan lintas sektor dan multi *stakeholder* baik di Pusat dan di Daerah. Peserta PKH terdiri dari ibu-ibu, yang memiliki anak balita, ibu hamil dan ibu yang memiliki anak usia sekolah SD dan SMP. Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM). (Depsos, 2009: 1).

PKH dimaksudkan untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin melalui bantuan dana tunai bersyarat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2008 adalah sebesar 34,96 juta atau 15,42% Pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ini menjadi sekitar 7.5% pada tahun 2015 melalui tiga jalur strategi pembangunan, yaitu *Pro-Poor* (bertumpu pada Penanggulangan Kemiskinan), *Pro-Job* (bertumpu pada Penyediaan Lapangan Kerja) dan *Pro-Growth* (bertumpu pada Pertumbuhan Ekonomi) untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, Pemerintah mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program dalam tiga *cluster*. (Media Center Depsos, 2009: 4).

Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH. (Media Center Depsos, 2009:4).

3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM). (Pusdiklat Kesos, 2007:20).

Ada beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendamping PKH, yaitu dengan melakukan pertemuan terbuka oleh pendamping dengan calon peserta PKH guna untuk mensosialisasikan program yang diberikan pemerintah beserta manfaat program dan bagaimana berpartisipasi dalam pgroram PKH.

Keluarga yang dipilih mengikuti program dikumpulkan dan diberi arahan untuk membentuk kelompok-kelompok ibu yang terdiri dari lebih kurang 25 orang dalam satu kelompok. Kelompok ini kemudian memilih ketua kelompok ibu penerima sebagai koordinator kelompok dan menetapkan jadwal pertemuan rutin kelompok untuk berdiskusi bersama dalam menjalankan program. Pada pertemuan ini juga dilakukan pemeriksaan formulir yang digunakan sebagai alat verifikasi keikutsertaan, antara lain pemeriksaan akta lahir anak dan membantu pengadaannya jika belum tersedia, penyusunan jadwal kunjungan, dan sebagainya.

2.4. Mutu Pendidikan

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. (Arif Rohman, 2009: 107-128).

Mutu menurut Salis (2006: 33) adalah sebuah filosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita. (Danim, 2003: 53)

Menurut Nugroho (2008: 44) Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala madrasah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu

input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Adapun kriteria mutu pendidikan yang baik sekolahan diharapkan memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sekolahan tersebut sudah bisa dibilang bermutu. Indikatornya adalah lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki tujuan dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya pengembangan staff sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan iptek dan adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu pendidikan. (Mulyasa, 2005: 85)

Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara sempit dan khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang sejahtera (Hadis dan Nurhayati, 2010:3). Oleh karena itu, guru sebagai suatu profesi harus profesional dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan yang diamanahkan kepadanya.

Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat (Sagala, 2007:99).

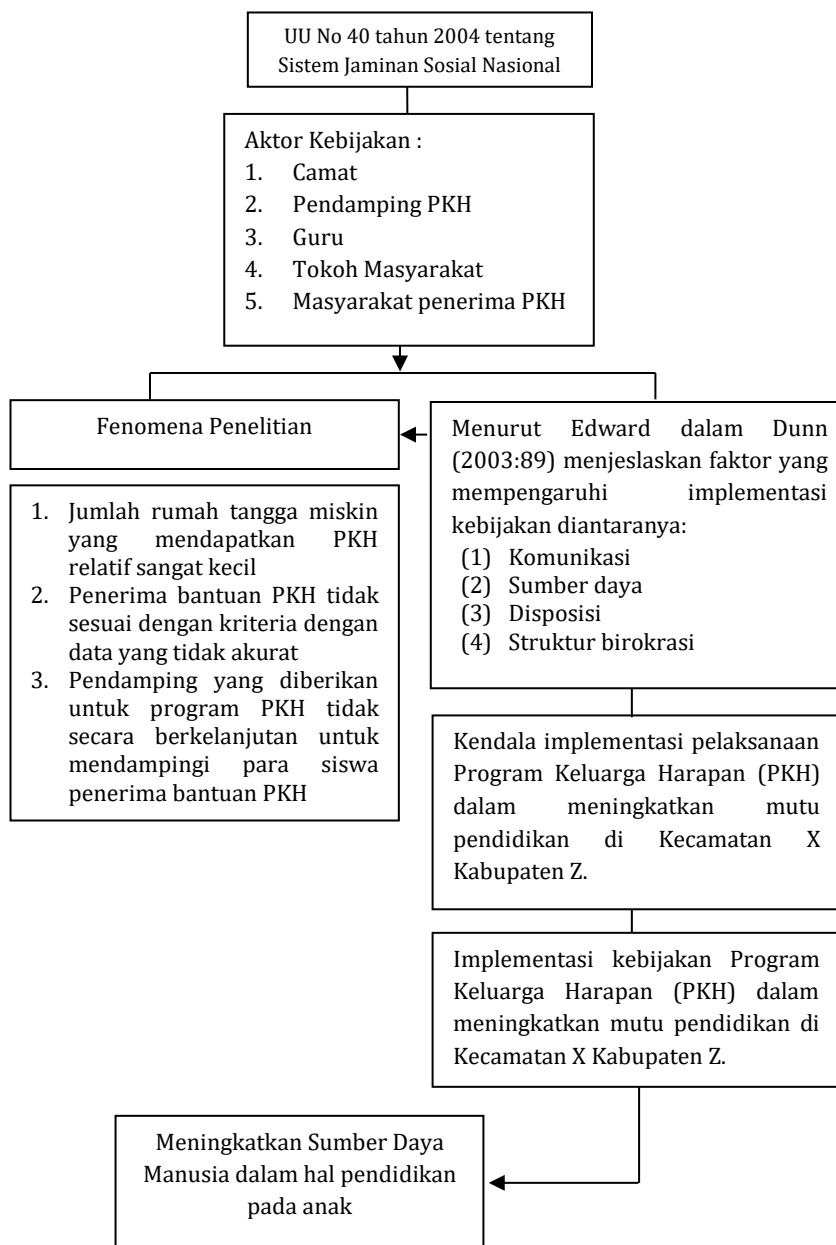
Menurut Husaini Usman (2009: 512) dalam bukunya Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, mengatakan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik seperti berikut ini:

1. Kinerja (*performa*): berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya: kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya banyak, putus sekolah sedikit, dan yang lulus tepat waktu banyak. Akibat kinerja yang baik maka sekolah tersebut menjadi sekolah favorit.
2. Waktu wajar (*timeliness*): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Waktu ulangan tepat. Batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar. Waktu untuk guru naik pangkat wajar.
3. Handal (*reliability*): usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dari tahun ke tahun. Sebagai sekolah favorit bertahan dari tahun ke tahun. Sekolah menjadi juara tertentu bertahan dari tahun ke tahun. Guru jarang sakit. Kerja keras guru bertahan dari tahun ke tahun.
4. Daya tahan (*durability*): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, tidak tutup. Siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat
5. Indah (*aesthetics*). Misalnya: eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Taman ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. Guru-guru membuat media pendidikan yang menarik. Warga sekolah berpenampilan rapi.

6. Hubungan manusiawi (*personal interface*): menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya: warga sekolah saling menghormati, baik warga intern maupun ektern sekolah, demokratis, dan menghargai profesionalisme.
7. Mudah penggunaannya (*easy of use*). Sarana dan prasarana dipakai. Misalnya: aturan-aturan sekolah mudah diterapkan. Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa. Contoh soal mudah dipahami. Demonstrasi praktik mudah diterapkan siswa.
8. Bentuk khusus (*feature*): keunggulan tertentu. Misalnya: sekolah ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di universitas bermutu. Unggul dengan bahasa Inggrisnya. Unggul dengan penguasaan teknologi informasinya (komputerisasi). Ada yang unggul dengan karya ilmiah kesenian atau olahraga.
9. Standar tertentu (*conformance to specification*): memenuhi standar tertentu. Misalnya: sekolah sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional atau sekolah sudah memenuhi ISO 9001:2000 atau sekolah sudah memenuhi TOEFL dengan skor 650.
10. Konsistensi (*Consistency*): keajegan, konstan, atau stabil. Misalnya: Mutu sekolah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun seperti harus mengontrol nilai siswa-siswanya. Warga sekolah konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Apabila berkata tidak berbohong, apabila berjanji ditepati, dan apabila dipercaya tidak mengkhianati.

11. Seragam (*uniformity*): tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya: sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
12. Mampu melayani (*serviceability*): mampu memberikan pelayanan prima.. Misalnya: sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan primanya kepada pelanggan sekolah sehingga semua pelanggan merasa puas.
13. Ketepatan (*Accruracy*): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya: Sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah, guru-guru tidak salah dalam menilai siswa-siswanya. Semua warga sekolah bekerja dengan teliti. Jam Belajar di sekolah berlangsung tepat waktu.

2.5. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan terjadinya kemiskinan dalam masyarakat, sehingga pemerintah berupaya membuat suatu kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan berdasarkan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mencakup bidang Pendidikan dan Kesehatan khususnya bagi RTSM yang bisa memenuhi syarat dalam PKH sehingga dapat di implementasikan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian dana pendidikan bagi anak usia sekolah 0-18 tahun khususny bagi RTSM.

Namun dalam hal ini terdapat berbagai permasalahan yang diantaranya Jumlah rumah tangga miskin yang medapatkan PKH relatif sangat kecil, penerima bantuan PKH tidak sesuai dengan kriteria dengan data yang tidak akuran, pendamping yang diberikan untuk program PKH tidak secara berkelanjutan untuk mendaping para siswa penerima bantuan PKH, sehingga dalam penelitian ini penelitian ingin menganalisis tentang Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z dan kendala implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan X Kabupaten Z dengan lingkup membahas bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan Kecamatan lainnya.

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu Desa penelitian, Desa penelitian merupakan serangkaian rancangan penelitian yang dimulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian. Penelitian Kualitatif merupakan suatu pendekatan yang disebut dengan pendekatan investigasi karena biasanya penelitian mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Menurut Arikunto 2002: Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Metode dalam penelitian ini penulis gunakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penafsiran diskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan pada Desa Kecamatan X Kabupaten Z, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian atau karya tulis yang relevan dengan penelitian ini dan melalui observasi (pengamatan).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan objek studi, dengan demikian analisis data yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dokumentasi dan observasi.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Maka peneliti akan mengadakan observasi langsung yang disebut dengan observasi partisipasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan untuk memperoleh data wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya, penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

Observasi akan penulis lakukan terhadap data-data pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bagaimana pengelolaan program tersebut dan melihat bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

Pengamatan langsung di lapangan sangat membantu penulis mengetahui bagaimana respon, pendapat, dan sebagainya tentang pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara, yaitu melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Penulis melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposive. Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan-keterangan secara langsung mengenai data-data yang diperlukan untuk mempermudah bagi penulis dalam melakukan penelitian. Informan akan ditentukan secara *purposif (purposive)* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan, maka informan dalam penelitian ini adalah Camat X, Sekretaris Camat X, Geuchik, Sekdes, Kaur Pemerintahan, Kepala Sekolah, Guru, siswa dan masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Berikut nama nama informan yang diwawancari dalam penelitian:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Drs Muhammad Nurdin	Camat
2.	Asrizal,AMD	Pendamping PKH
3.	Juraida	Wakil Kepala Sekolah SMP 1 X
4.	Jamaliyah	Guru SMP 1 X
5	Halimah tusakdiah	Masyarakat Penerima PKH
6	Nursiah	Masyarakat Penerima PKH

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data hal-hal dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian, penulis melakukan penggunaan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan resmi yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan seperti laporan-laporan, buku-buku peraturan Perundang-undangan, data dokumen keluarga miskin, dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dilakukan sejak awal sampai selesainya pengumpulan data, data yang telah terkumpul diolah secara berurutan. langkah-langkah analisa data yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah :

1. Mengorganisasikan data dengan maksud agar data-data dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disaran oleh data. Data yang dianalisis adalah data jumlah penduduk peserta PKH dan data observasi lokasi penelitian.
2. Mengedit data-data dengan maksud supaya dapat membedakan data-data yang tidak perlu dan data-data yang tidak perlu sehingga akan memperoleh kesimpulan sesuai dengan penelitian. Kesimpulan yang diambil adalah ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam program PKH.
3. Reduksi data dengan maksud proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan,

mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

4. Kesimpulan data yaitu menyimpulkan keseluruhan data yang terkumpulkan setelah direduksi. Dalam kalitanya penelitian ini adalah menyimpulkan partipasi bagaimana tingkat partipasi masyarakat dalam PKH dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan PKH.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Z terletak pada geografis dengan titik koordinat 96.52.00⁰-97.31.00⁰ Bujur Timur dan 04.46.00⁰-05.00.40⁰ Lintang Utara. Secara administratif Kabupaten Z memiliki luas wilayah 3.296,86 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota L dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten BM;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten AT; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten B.

Kabupaten Z terdiri dari 27 Kecamatan, 70 Kemukiman, 852 Desa (Desa), salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Z adalah X adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Z. Kecamatan X memiliki luas wilayah sebesar 418,32 Km atau 12,69% dari keseluruhan luas wilayah di Kabupaten Z (3,296,86Km). Kecamatan X memiliki 39 Desa dan memiliki 4 pemukiman yang membawahi beberapa Desa yang terdiri dari dusun pemukiman pante bahagia terdiri dari 13 Desa yang terdiri dari dusun kemukiman terdiri dari 13 Desa dan 39 dusun, pemukiman S terdiri dari 7 Desa (21 Dusun), pemukiman pt terdiri dari 9 Desa (27 Dusun) dan pemukiman X yang terdiri dari 10 Desa (30 dusun).

Secara geografis semua desa yang berada dalam wilayah Kecamatan X berada didaerah daratan, sedangkan berdasarkan

teorografisnya semua desa berada di hamparan. Berdasarkan mata pencaharian, mayoritas penduduk Kecamatan X bergerak dalam sektor pertanian.

4.1.2. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan.

4.1.2.1 Mutu Pendidikan

Masyarakat miskin di pedesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan tanah, kondisi tanah yang relatif kurang subur, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidak berdayaan dalam menentukan harga produk pertanian yang dihasilkan.

Untuk menangani permasalahan kemiskinan di Desa pemerintah mengeluarkan program PKH. Program Keluarga Harapan PKH adalah pemberian bantuan tunai kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan persyaratan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Asrizal selaku Pendamping Program PKH di Kecamatan Payabakong menjelaskan bahwa:

“Program PKH salah satu program yang dibuat oleh pemerintah semenjak tahun 2007 untuk mengurangi kemiskinan di Desa, termasuk yang telah disalurkan di Kecamatan Payabakong, dalam pemberian program PKH diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk dipergunakan dalam hal pendidikan dan kesehatan anak, pemerintah menjamin semua anak bangsa bisa memperoleh pendidikan yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang”, (Wawancara, 4 Juni 2015).

Pendidikan dan Kesehatan merupakan tanggung jawab dari pada pemerintah. Dijelaskan Muhammad Nurdin selaku Camat di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“Program keluarga harapan yaitu program bantuan tunai yang diberikan untuk keluarga yang sangat miskin atau bisa dikatakan kepada keluarga yang fakir dalam membantu dana pendidikan, kesehatan anak dengan berbagai persyaratan didalam, diantaranya siswa dan siswi yang berhak menerima bantuan PKH anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, anak di bawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, serta ibu hamil dan nifas, dengan berbagai persyaratan tersebut bisa memenuhi kewajiban terkait dengan pendidikan dan kesehatan”, (Wawancara, 4 Juni 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa Program yang di keluarkan oleh pemerintah pada tahun 2007 untuk meningkatkan pendidikan dan menjamin kesehatan masyarakat yang sangat miskin sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan, dengan hal tersebut pemerintah memberikan program PKH untuk memberikan hak masyarakat dimana orang miskin ditanggung oleh pemerintah. Pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Negara. Pendidikan yang relatif mahal dan mayoritas penduduk yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan itu tidak merata dikalangan masyarakat miskin. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi ketidak merataan pendidikan salah satunya dengan mengeluarkan program PKH.

Menurut Ismail selaku Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Z mengatakan bahwa :

“ dalam memberikan bantuan PKH kepada masyarakat tugas BPS hanya melakukan pendataan, untuk melihat berapa jumlah rumah tangga miskin, setelah dilakukan pendataan dikirim langsung ke BPS Provinsi, untuk dilakukan penetapan, sedangkan untuk tata cara penyalurannya pihak BPS tidak mengetahui karena bukan tupoksinya, BPS hanya melakukan pendataan”,
(Wawancara, 22 September 2015)

Kemudian menurut Yanis selaku Bidang Pemberdayaan pada Dinas Sosial dan Mobilitas Kabupaten Z mengatakan bahwa :

“Program PKH diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, namun dalam pelaksanaannya masih ada data yang tidak

sesuai dengan kondisi masyarakat, karena selama ini data yang diambil langsung dari BPS pusat sehingga sampai di daerah dievaluasi kembali ternyata masih banyak masyarakat yang tidak berhak menerima PKH, sehingga di pihak pendamping mendata kembali kemudian diserahkan ke UPPKH Kabupaten untuk dinaikan lagi ke pusat” (Wawancara, 22 September 2015)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa BPS Z hanya melakukan pendataan, tidak menyalurkan bantuan PKH yang dikirim langsung ke Provinsi program PKH belum tepat sasaran karena masih ada terjadi salah data dalam pendataannya, di mana data yang diambil langsung dari pemerintah pusat yang harus didata kembali oleh pendamping PKH, selain itu juga jika dilihat dari mutu pendidikan juga belum meningkat karena masih kurangnya sosialisasi dari pendamping untuk membantu dalam hal pembelajaran dan berbagai faktor lainnya seperti ekonomi dan jarak tempuh sekolah dengan rumah siswa.

Menurut Asrizal selaku Pendamping Program PKH di Kecamatan Payabakong menjelaskan bahwa :

“Penerimaan program PKH disalurkan melalui sekolah, di mana jumlah penerimaan PKH di hitung dari tahun 2013 berjumlah 370 KK dan 20 siswa dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program PKH, sehingga untuk sekarang sisa penerima program PKH berjumlah 350 KK pada tahun 2015, sedangkan penerimaan program PKH untuk keseluruhan dari tahun 2013 sampai sekarang ini berjumlah 2.039 orang, bantuan ini sangat bermanfaat bagi para penerima dalam

membantu dalam pendidikan dalam peningkatan mutu dan kesehatan” (Wawancara 1 Juni 2015).

Bantuan yang diberikan kepada anak melalui program PKH khusus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kepada anak. Menurut Juraida selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 1 X mengatakan bahwa :

“yang berhak untuk menerima program PKH harus memenuhi berbagai kriteria, diantaranya masyarakat miskin yang mendapatkan kartu dari Pemerintah Pusat, atau tertanda sebagai pengguna kartu PKH, namun yang terjadi sekarang ini jumlah KK yang mendapatkan sangat banyak, diantaranya ada anak yang mampu namun mendapatkan dana PKH seperti salah satu data anak mendapatkan kartu PKH mempunyai kendaraan bermotor untuk bersekolah dengan pekerjaan ayahnya seorang wirausaha, akan tetapi kartu tersebut langsung dikirim dari pusat bukan sekolah yang memberikannya, sehingga terlihat tidak tepat sasaran”, (Wawancara, 8 Juni 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa pemberian bantuan dana PKH kepada masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan diberikan kepada anak miskin, akan tetapi yang terjadi dilapangan bahkan masih sangat banyak yang mendapatkan dana tersebut tidak tepat sasaran, anak yang berkehidupan mampu juga mendapatkan bantuan tersebut, dan ada anak yang berhak namun tidak mendapatkan, dimana program PKH tersebut diberikan dari tingkat pusat, sehingga sekolah tidak berhak untuk mengatur dana tersebut, karena dana tersebut diberikan

kepada para pelajar yang mendapatkan kartu PKH dari pemerintah pusat.

Menurut Muhammad Nurdin selaku Camat di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“dalam implementasi program PKH untuk masyarakat tidak diberikan begitu saja, pemerintah juga menyediakan pendamping yang membantu pendidikan anak, untuk pendamping yang diberikan disetiap Kecamatan memiliki 2 pendamping untuk seluruh Kecamatan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah, di mana pendamping bisa membina anak-anak dalam hal prestasi pendidikan”, (Wawancara, 1 Juni 2015)

Kemudian dijelaskan kembali oleh Asrizal selaku Pendamping Program PKH di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“dalam menjalankan tupoksi, tugas dari pendamping yaitu memberikan sosialisasi, pengawasan dan juga mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmen untuk pelaksanaan program PKH, terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat Provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung”, (Wawancara, 4 Juni 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam meluncurkan program PKH untuk bidang pendidikan dan kesehatan

untuk terlaksanakan dengan baik program tersebut pemerintah memberikan pendamping kepada para siswa dan siswi untuk mendapatkan berbagai sosialisasi dan pengawasan dalam hal penerimaan bantuan tersebut, di mana seorang pendamping berhak memberikan arahan kepada siswa dan siswi dalam hal peningkatkan mutu pendidikan, dan juga seharusnya mengarahkan kepada anak agar meningkatkan mutu pendidikan agar dana tersebut terus diberikan oleh pemerintah tidak hanya saja pada tahap rajin sekolah.

Menurut pemaparan dari Jamaliah selaku Guru SMP 1 X mengatakan bahwa :

“untuk implementasi program PKH ini tujuannya meningkatkan mutu pendidikan bagi anak, namun yang terjadi prestasi anak penerima program PKH belum terlalu meningkat, hanya saja para siswa dan siswi yang mendapatkan dana bantuan PKH rajin dalam bersekolah bahkan sangat jarang siswa dan siswi libur sekolah karena langsung ditegur oleh guru, selain itu juga takut akan dipotong uang yang telah diberikan jika sering tidak masuk sekolah, mutu pendidikan masih sama saja tidak ada pengaruhnya”, (Wawancara, 8 Juni 2015).

Program penanggulangan kemiskinan sangat banyak dikeluarkan oleh pemerintah, namun belum bisa memberikan perubahan. Dijelaskan oleh Juraida selaku Wakil Kepala Sekolah pada SMP 1 X mengatakan bahwa

“Peningkatan mutu pendidikan dan prestasi bagi anak yang mendapatkan dana PKH belum terlihat, para siswa dan siswi hanya rajin dalam sekolah yang diakibatkan

takut dengan sanksi akan pemotongan jika libur sekolah, sebenarnya tujuan program tersebut siswa harus berlomba-lomba dalam bidang pendidikan, namun yang terjadi para penerima dana biasa saja, pendamping tidak pernah mengarahkan atau bimbingan pendidikan, untuk sekarang ini tidak ada siswa program PKH yang mendapatkan prestasi, akan tetapi ada siswa yang memang sebelum mendapatkan program PKH sudah memiliki prestasi, (Wawancara, 4 Juli 2015)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa program PKH yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, di mana program yang diberikan kepada anak, belum ada anak yang berprestasi berkat bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun ada keuntungan para siswa yang mendapatkan dana tersebut sangat jarang libur sekolah hanya dengan karena sanksi yang diberikan, jika para siswa dan siswi sering libur sekolah maka dana bantuan tersebut di potong, bantuan yang diberikan belum berimbas pada mutu pendidikan anak di masa yang akan datang sehingga diperlukan banyak bimbingan dari pendamping kepada anak yang mendapatkan program PKH.

Menurut Wika Yaton Dini selaku Siswi SMP X mengatakan bahwa :

“Dengan adanya dana PKH sangat membantu kami dalam bersekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah, untuk sekarang ini dalam bersekolah kami sangat rajin, dan program tersebut benar-benar bisa membantu orang tua kami dalam membeli keperluan sekolah, orang tidak

terlalu terbebani lagi dengan kebutuhan sekolah karena dana ini terus diberikan” (Wawancara, 22 September 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa anggapan siswa terhadap program PKH yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu siswa dalam bersekolah, dan bisa mengurangi beban orang tua untuk membeli keperluan sekolah, sehingga para siswa tidak ada lagi kendala apapun dalam bersekolah, serta bisa terus rajin untuk sekolah.

Menurut Halimatulsakdiah selaku keluarga penerima program PKH di Kecamatan X mengatakan bahwa :

“Untuk jumlah biaya yang didapatkan dalam program PKH dari tahun ke tahun sangat bervariasi, dana PKH dari tahun pertama berjumlah sebanyak Rp 535.000, tahun selanjutnya sebesar 250.000, dan untuk sekarang ini diberikan sebanyak 200.000 yang diberikan pada tanggal 18 April 2015, dari tahun anggaran PKH terus menurun, namun berdasarkan jawaban dari pendamping dana yang diberikan sesuai dengan dana yang diberikan dari pusat bukan ketentuan dari pada pemerintahan Pusat” (Wawancara, 5 Juli 2015).

Selanjutnya ungkapan dari Nurasiah selaku keluarga penerima program PKH di Kecamatan X mengatakan bahwa :

“Dana yang diberikan dari program PKH digunakan untuk keperluan sekolah anak diutamakan seperti untuk membeli baju, sepatu, tas, dan buku, namun jika ada yang lebih untuk keperluan yang diinginkan anak dan juga untuk

kebutuhan rumah jika sudah mencukupi untuk kebutuhan anak sekolah”, (Wawancara, 5 Juni 2015).

Berdasarkan wawancara diatas mendeskripsikan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah terus berfluktuasi bahkan dana yang diberikan dari tahun ke tahun terus menurun, sedangkan dana yang diberikan tersebut dalam satu tahun empat kali, jika dana yang diberikan terus berkurang maka juga akan membuat kebutuhan bagi pendidikan anak tidak mencukupi, apalagi sekarang ini dana diberikan sebesar Rp 200.000 sudah tidak mencukupi lagi. Tujuan PKH dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.

Menurut Zuraida selaku Wakil Kepala Sekolah pada SMP Negeri X mengatakan bahwa :

“Pemerintah menyediakan pendamping untuk para anak didik yang mendapatkan bantuan PKH, di mana pendamping wajib melakukan tinjauan ke sekolah melihat dan menanyakan kehadiran anak didik yang mendapatkan PKH ke sekolah, akan tetapi hal ini kurang dilakukan dan dievaluasi oleh pendamping, di mana pendamping harus menjalankan tugasnya untuk anak didik dalam mengevaluasi para yang mendapatkan PKH” (Wawancara, 12 Agustus 2015).

Ditambahkan Asrizal selaku Pendamping pada Kecamatan X mengatakan bahwa :

“untuk menjalankan program PKH ini khusus mengenai pendidikan tugas seorang pendamping sebelum memberikan informasi kepada masyarakat penerima PKH terlebih dahulu mengecek ke kantor pos untuk melihat jadwal dana PKH bisa diambil oleh siswa dan siswi, di mana sebelum program ini terlaksanakan pendamping dan kantor pos telah mengadakan pertemuan untuk membahas kapan jadwal bisa diambil oleh masyarakat untuk kebutuhan sekolah, sehingga pada saat pengambilan dana sudah tertib karena ada kerja sama antara pendamping dengan kantor pos yang bersangkutan”
(Wawancara, 28 September 2015)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa pemerintah tidak saja memberikan program bantuan kepada para pelajar, namun pemerintah juga menyediakan pendamping baik untuk melihat jadwal penerima PKH yang bekerja sama dengan kantor pos agar penerima PKH bisa tertip, maupun untuk meninjau kembali para pelajara agar bisa meningkatkan mutu pendidikannya, serta pendamping juga dituntut untuk melakukan evaluasi bagi para pelajar untuk bisa melihat perkembangannya.

Menurut Zainabon selaku Penerima PKH di Kecamatan X mengatakan bahwa :

“Dalam penerimaan PKH kami jarang dipanggil untuk menghadiri rapat/pertemuan jadi kami kurang mengetahuinya, yang kami ketahui PKH itu di beri uang untuk anak sekolah melalui sekolahnya, jika ada program

yang diberikan bersifat pribadi seperti pada tahun 2016 program yang di buat oleh pendamping PKH yaitu Maulid Nabi yang lain tidak ada, atau kami yang tidak mengetahuinya”, (Wawancara, 29 Maret 2016).

Ditambahkan lagi oleh Herawati selaku pendamping PKH di Kecamatan X mengatakan bahwa

“Selama ini tidak ada program apapun dari pemerintah yang diberikan dalam peningkatan program PKH, karena tidak di sedianya anggaran, program PKH itu hanya untuk pendidikan dan kesehatan atau kalau mau buat programpun itu di ambil dari dana pribadi, makanya dikecamatan Payabakong belum adanya program dalam PKH, untuk lainnya baik pelatihan maupun pembinaan khusus untuk anak yang menerima PKH”, (Wawancara, 29 Maret 2016).

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa program PKH diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk pendidikan yang akan membantu masyarakat mengenai biaya pendidikan, dan juga untuk kesehatan ibu hamil, jika program lain yang dibuat dari program PKH ini tidak ada karena pemerintah memang tidak menganggarkan dana untuk program lain seperti pelatihan ataupun pembinaan untuk penerima PKH, yang dilakukan hanya rapat jika dicairkan dana PKH.

Menurut Nursial, selaku Guru SD Negeri 8 di Kecamatan Payabakong mengatakan bahwa :

“dalam proses penyaluran dana dari program PKH buat anak didik melalui sekolah di mana pendamping hanya

mengecek daftar kehadirannya dan meminta rapor serta KTP dan KK orang tua Wali murid, lebih dari itu tidak dilakukan, bahkan para pendamping tidak pernah mempertanyakan mengenai prestasi siswa yang mendapatkan program PKH selama ini”, (Wawancara, 1 April 2016)

Kemudian dilanjutkan oleh Drs Abdurahman, selaku Guru SMA Negeri 1 Payabakong

“Program ini sangat membantu anak sekolah dalam sekolah dan lepas dari pekerjaan anak di bawah umur, sekarang sudah rata-rata anak tamatan SMP melanjutkan ke SMA karna kebutuhan/biaya sekolah sudah ringan, dengan program ini akan menampung aspirasi anak-anak dari kurang mampu bisa melanjutkan sekolahnya sampai dengan SMA. (Wawancara, 2 April 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa program PKH, salah satu program yang mendukung rakyat kecil ataupun masyarakat miskin yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga untuk sekarang ini tidak ada lagi anak-anak yang dibawah umur mencari pekerjaan untuk bersekolah, di mana pemerintah telah memberikan santuan untuk anak-anak tersebut yaitu PKH bantuan untuk pendidikan anak yang kurang mampu.

4.1.3 Kendala Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z

Program keluarga harapan program pendidikan perlindungan sosial adalah untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadin berbagai kendala.

4.1.3.1 Kendala Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar.

Implementasi Program Keluarga Harapan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya secara bertahap dan konsisten sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan PKH tersebut. Namun dalam permasalahan dilapangan terjadi berbagai hambatan.

Menurut Muhammad Nurdin selaku Camat di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“Kendala dalam implementasi program PKH, sering tidak tepat sasaran dalam perimaan bantuan tersebut, dimana pada tahun 2013 sebanyak 20 KK dikeluarkan karena tidak sesuai kriteria penerima program PKH, dan membuat masyarakat kecewa, data yang didapatkan oleh

pemerintah tidak lengkap untuk pendataan masyarakat miskin, sehingga menjadi terkendala dalam pelaksanaan, banyak masyarakat yang tidak setuju dikarenakan masyarakat yang berhak menerima namun tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut”, (Wawancara, 1 Juni 2015).

Dilanjutkan lagi oleh Menurut Asrizal selaku Pendamping Program PKH di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“Kendala lain sering kami temui sekarang ini pada saat dilapangan adalah dalam proses pemutakhiran data, dimana pada saat pengecekan ulang data yang telah dikirim oleh pemerintah pusat terdapat peserta PKH di daerah Desa, ada diantaranya masyarakat tersebut yang telah pindah, yang membuat kesulitan untuk mencari masyarakat tersebut, dan untuk mengetahui apakah masyarakat itu masih mendapatkan dana PKH untuk tetap dilanjutkan atau tidak, kami kehilangan data, apalagi ada masyarakat yang pendatang untuk juga merupakan kesulitan”, (Wawancara, 4 Juni 2015).

Berdasarkan wawancara di atas maka terdapat berbagai kendala dalam implementasi program PKH yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu dalam hal pendidikan dan kesehatan masyarakat, di mana dalam pelaksanaannya masih tidak tepat sasaran, ada masyarakat yang tidak layak menerima bantuan tersebut dan ada juga masyarakat yang berpindah-pindah menerima bantuan tersebut sehingga tidak mendapatkan informasi masyarakat tersebut masih menggunakan bantuan PKH atau tidak.

Dalam arti upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan.

Menurut Takdir selaku bidang pemberdayaan pada Dinas Sosial dan Mobilitas Kabupaten Z menjelaskan bahwa :

“Kendala yang dihadapi di Kecamatan dalam meningkatkan mutu pendidikan, masih banyak masyarakat atau anak didik belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah dari keseluruhan anak didik hanya 2.039 pada tahun 2015 yang mendapatkan bantuan PKH, sehingga masih sangat banyak masyarakat yang berhak mendapatkan PKH namun tidak mendapatkan”, (Wawancara, 12 Agustus 2015).

Kemudian dilanjutkan lagi oleh Idris selaku Keuchik di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“program PKH yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat miskin dalam melanjutkan sekolahnya, dengan adanya PKH anak didik yang mendapatkan bantuan PKH semakin rajin sekolah yang merupakan salah satu motivasi anak untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun di Desa ini juga masih banyak anak yang tidak aktif sekolah dikarenakan orang tuanya belum mampu membiayai sekolahnya, tanpa bantuan dari pemerintah”, (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa dengan adanya PKH bisa meningkatkan mutu pendidikan anak didik, karena anak didik termotivasi dengan bantuan yang diberikan, selain itu juga jika para pelajar tidak rajin dalam sekolah maka akan dipotong uang yang diterima dalam PKH, namun masih sangat banyak pelajar yang mengharapkan bantuan dari pemerintah karena masyarakat masih keterbatasan dana untuk menyekolahkan anaknya.

Muhammad Nurdin selaku Camat di Kecamatan X menjelaskan bahwa :

“Pemerintah memang memberikan pendamping untuk penerimaan program PKH, namun yang terjadi sekarang ini pendamping hanya memberikan informasi pada saat dana yang akan diberikan dan mengawasi para penerima PKH saat pengambilan dana di Kantor Pos, sedangkan yang merupakan tugas pokok dari sosialisasi dan memberikan berbagai arahan bagi anak yang mendapatkan bantuan PKH tidak diberikan bahkan tidak ada sama sekali”,
(Wawancara, 8 Juni 2015)

Selain itu, Jamaliah selaku Guru di SMP 1 Payabakong di Kecamatan X mengatakan bahwa :

“Sebenarnya untuk penerima bantuan PKH harus diberikan pembinaan dari 0 sampai 18 tahun dan juga sosialisasi khusus dari pendamping, semenjak pertama penerima program PKH dari pihak pendampin/koordinatonya dan juga mengadakan pertemuan sebulan sekali, anak tetapi untuk saat ini pendamping seolah-olah tidak peduli terhadap anak

asuhannya yang membuat program PKH tersebut tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan anak”, (Wawancara, 4 Juni 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa kendala dalam implementasi program PKH yang diantaranya belum terlaksananya tugas dari pada pendamping secara baik, pendamping belum memberikan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan pada penerimaan program PKH, yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan tujuan dari pada mutu pendidikan tercapai. Untuk anak penerima PKH diberikan kunjungan yaitu pendamping PKH melakukan pertemuan dan mendatangi peserta PKH ke tempat tinggalnya ataupun melalui mekanisme kelompok dalam upaya mempererat tali persaudaraan dan menggali permasalahan serta bersama peserta mencari solusi pemecahan masalah yang timbul. Dalam melakukan kunjungan tersebut pendamping PKH diharapkan mampu menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk melakukan tatap muka sehingga diantara peserta PKH dan pendamping tercipta rasa simpati dan empaty diantara keduanya.

Menurut Takdir selaku Bidang Pemberdayaan pada Dinas Sosial dan Mobilitas Kabupaten Z mengatakan bahwa :

“dalam memberikan dana program PKH untuk masyarakat belum bisa meningkatkan mutu pendidikan karena yang diberikan hanya dana kepada para siswa untuk pendidikan sekolah, sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dipengaruhi beberapa faktor kurangnya fasilitas sekolah dipedesaan, kurangnya SDM guru, kurangnya dorongan orang tua untuk belajar sebab anak

tersebut harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan serta jarak tempuh antara rumah siswa dan sekolah karena tidak ada disediakan bus sekolah, (Wawancara, 22 September 2015)

Dilanjutkan oleh Jufriadi selaku koordinator kecamatan di Kecamatan X mengatakan bahwa :

“yang menjadi kendala yang sering dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu, tidak semua mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah, bahkan masih sangat banyak anak yang berhak mendapatkan bantuan dan masuk ke kriteria tidak mendapatkan bantuan tersebut, selain itu juga tidak semua bisa menampung pemenuhan di bidang pendidikan karena sebahagian anak jarak tempuh antara rumah dan sekolah sehingga semakin kepedesaan mutu pendidikan anak semakin rendah”, (Wawancara, 8 Agustus 2015).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa dalam mendapatkan mutu pendidikan tidak semua anak didik yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah, hanya sebagian masyarakat yang kurang mampu beruntung bisa mendapatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan pendidikan anak, untuk sekarang ini juga masih sangat banyak anak yang berhak mendapatkan bantuan dari PKH namun tidak mendapatkannya, sedangkan untuk mutu pendidikan belum meningkat hal ini dikerankan oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun dari faktor fasilitas disekolah dan fasilitas untuk siswa menempuh jarak ke sekolah.

Menurut Takdir selaku Bidang Pemberdayaan pada Dinas Sosial dan Mobilitas Kabupaten Z mengatakan bahwa :

“Permasalahan yang terjadi mengenai mutu pendidikan anak yang mendapatkan program PKH masih belum maksimal yang diakibatkan masih kurangnya sosialisasi dari pendamping untuk membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan anak, sehingga anak didik selama ini untuk menjalankan program PKH hanya mengetahui tentang memenuhi syarat untuk sekolah, dan juga jarak tempuh dari rumah ke sekolah jauh, yang membuat siswa dan siswi kualahan, yang mengakibatkan tidak semangat untuk belajar, selain itu juga faktor ekonomi karena siswa dan siswi harus membantu orang tuannya bekerja”,
(Wawancara, 22 September 2015)

Kemudian dijelaskan kembali oleh Asrizal selaku Pendamping Program PKH pada Kecamatan X mengatakan bahwa :

“dalam mendapatkan dana PKH terdapat berbagai kendala yang diantaranya dalam penyaluran khususnya untuk pendidikan PKH yaitu pemahaman masyarakat peserta PKH yang lemah dalam melaksanakan aturan yang ditentukan oleh program PKH, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan daya pikir yang lemah, selain itu juga masih kurang pedulinya masyarakat pada anak dalam meningkatkan potensi/ mutu belajar siswa”,
(Wawancara, 30 September 2015)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa terdapat kendala dalam melaksanakan PKH masih

tertabasnya sosialisasi yang diberikan oleh pendamping sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang program PKH itu sendiri, selama ini masyarakat hanya mengambil uang ke kantor pos, namun tidak mengetahui bentuk bagaimana berjalannya program PKH tersebut, seperti masih ada orang tua yang mendapatkan program PKH masih kurang peduli dengan anaknya dalam belajar

Banyak keluhan yang didapatkan masyarakat dalam mendapat program PKH diantaranya menurut Nur Asiah selaku penerima program PKH mengatakan bahwa :

“memang pemerintah memberikan bantuan untuk pendidikan anak, namun uang tersebut diberikan dalam waktu yang lama, jika ada keperluan anak yang dibutuhkan yang sangat mendesak tidak bisa dipergunakan, dalam perjanjiannya dana tersebut diberikan 3 bulan sekali, akan tetapi sering juga tertunda-tunda, hal tersebut yang sulit karena tidak ada ketentuan pasti dalam pengeluaran untuk dana pendidikan ini, selain itu juga anak saya tidak pernah libur sekolah dalam tahun ini, tetapi jumlah dana PKH yang diberikan setiap tahap berbeda-beda, kami kurang tahu kenapa berbeda-beda, apa memang berbeda-beda atau memang ada pemotongan, kami kurang mengetahuinya”, (Wawancara, 5 Oktober 2015)

Ditambahkan lagi oleh Halimatusakdia selaku penerima PKH pada Kecamatan X mengatakan bahwa :

“Saya orang Desa, jadi program yang diberikan oleh pemerintah seperti PKH saya tidak begitu tahu, saya hanya

mengetahui jadwal pengambilan uang dana pendidikan anak dari pendamping yang diberitahukan oleh ketua kelompok untuk keperluan sekolah anak, mengenai lain saya tidak mengetahuinya”, (Wawancara, 5 Oktober 2015)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat deskripsikan bahwa program PKH walaupun sudah lama terlasananya, namun masih sangat banyak masyarakat yang mendapatkan dana tersebut tidak mengetahui tentang program PKH yang diberikan oleh pemerintah, pendamping selama ini tidak bekerja dengan baik, tidak memberikan berbagai informasi kepada masyarakat mengenai program yang diberikan oleh pemerintah, selama ini pendamping hanya memberikan arahan jadwal pengambilan dana PKH, di mana seharusnya pendamping memberitahukan kepada orang tua untuk mendampingi anaknya dalam hal pendidikan dan bisa meningkatkan mutu pendidikan anak di sekolah dengan dukung orang tua.

Menurut Abdurrahman selaku Guru SMA Negeri 1 X mengatakan bahwa :

“kendala dalam pelaksanaan program ini memang tidak adan namun hanya dana yang di berikan kurang tercukupi untuk keperluan sekolah karna biaya sekolah lebih tinggi dari SD dan SMP, untuk keperluan seperti sepatu, buku, dan bahkan untuk uang jajan sehari-hari, bantuan ini diberikan bertahap oleh pemerintah, untuk kendala lainnya tidak ada”, (Wawancara, 24 Maret 2016).

Ditambahkan oleh Faridah selaku ketua kelompok pada Kecamatan X mengatakan bahwa

“pertemuan untuk program PKH jarang dilakukan karna pertemuan itu dilakukan oleh pendamping bukan saya jadi saya tidak tau tentang pengadaan pertemuan karna di sini tugas saya hanya memberi tahu kepada ibu-ibu pada saat pengambilan uang ke kantor pos. Waktu di adakan pertemuan selalu di dampingi oleh pendamping jadwal sebenarnya sebulan 2 kali ini di lakukan pada saat pemukhiran data dan tidak ada arahan bagi ibu yang anaknya sekolah bagaimana dalam membimbing/ mengarahkan anak supaya mutunya meningkat, itu yang menjadi kendala besar”, (Wawancara, 23 Maret 2016)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dideskripsikan bahwa kendala dalam pelaksanaan PKH hanya jarang dilakukan pertemuan, kurangnya perhatian yang diberikan oleh pembimbing kepada para penerima PKH, tidak ada arahan yang diberikan PKH agar para siswa menerima PKH untuk meningkatkan mutu pendidikan selain itu juga anggaran yang diberikan kepada siswa penerima PKH masih sangat terbatas tidak mencukupi untuk keperluan sekolah.

4.2 Pembahasan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan.

4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

Program Keluarga Harapan (PKH), adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM melalui ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dibidang pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional untuk membantu keluarga rumah tangga sangat miskin dengan bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer).

Program ini melibatkan berbagai Instansi pemerintah dan lembaga di pusat maupun di daerah. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Agar penanganan permasalahan kemiskinan melalui PKH dapat berhasilguna dan berdayaguna maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi petugas secara terencana dan berkesinambungan. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan (service provider), pendamping maupun petugas lainnya,

Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing, merupakan cara yang terbaik untuk melakukan kerjasama, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal. Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Akhirnya target fungsional PKH

yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok rumah tangga sangat miskin dapat terwujud.

Kebijakan Pemerintah untuk mengeluarkan apa yang dinamakan PKH adalah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM). Bantuan itu berupa pemberian langsung tunai berupa uang. Maksud dari pemberian langsung tunai ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya, pendidikan, dan kesehatan. Dalam PKH ini penerima program harus melakukan umpan balik kepada Pemerintah yaitu dengan cara mewajibkan anaknya untuk terus bersekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di rumah sakit. Dari petunjuk operasional PKH, terdapat tujuan utama dan tujuan khusus PKH.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Sedangkan tujuan secara khusus, terdiri atas beberapa bagian:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Pada pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kecamatan X Kabupaten Z, ada peraturan penentuan penerima program. Persyaratan utamanya adalah target penerima

merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam penentuan RTSM, BPS memiliki peran yang cukup vital. Ketentuan lainnya adalah RTSM yang memiliki keluarga terdiri dari anak-anak yang berumur 0-15 tahun dan ibu hamil/nifas/. Tindak lanjutnya dari bantuan ini hanya akan diberikan kepada RTSM terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang di atur dalam program.

Tugas dan tanggungjawab Pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM peserta PKH. Wilayah kerjanya meliputi seluruh desa/kelurahan dalam satuan wilayah kerja di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan X. Dalam melaksanakan tugasnya Pendamping PKH bertanggungjawab kepada UPPKH Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Camat setempat.

Tugas Persiapan Pendamping PKH:

- a. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH.
- b. Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- c. Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendamping.
- d. Membantu peserta PKH dalam mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH kabupaten/kota.
- e. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok ibu-ibu peserta PKH.

- f. Memfasilitasi proses penetapan jadwal kunjungan peserta PKH kesehatan.
- g. Mendampingi peserta PKH kesehatan dalam kunjungan awal di Posyandu. Memfasilitasi proses pendaftaran sekolah bagi anak-anak peserta PKH yang belum terdaftar di satuan pendidikan.

Tugas Rutin Pendamping PKH:

1. Menerima formulir pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir ini ke UPPKH Kabupaten/Kota.
2. Menerima pengaduan dari ketua kelompok dan atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok.
5. Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen.
6. Mengadakan pertemuan pengembangan program dengan penyedia layanan dan UPPKH Daerah.
7. Menginformasikan jadwal pembayaran bantuan kepada peserta PKH serta menghadiri proses pembayaran bantuan di kantor Pos.
8. Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program).

Pendamping PKH merupakan elemen penting bagi kesuksesan program, karena itu interaksi pendamping dengan peserta PKH merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pendamping diantaranya:

1. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan calon peserta PKH

Tugas awal pendamping adalah menyelenggarakan pertemuan awal dengan calon peserta PKH. Pertemuan awal ini harus melibatkan seluruh calon peserta PKH yang terdaftar di kecamatan, dan mengundang perwakilan petugas Puskesmas dan Sekolah. Agar lebih efektif seyogyanya dibuat oleh Camat setempat. Oleh sebab itu pendamping harus melakukan koordinasi dengan Camat setempat. Undangan peserta akan dikirim langsung kepada peserta melalui Pos.

Tujuan pertemuan awal:

1. Menginformasikan tujuan, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya mengenai PKH dan membagi-bagikan bahan-bahan program.
2. Menjelaskan komitmen (kewajiban) yang harus dilakukan oleh calon peserta PKH untuk dapat menerima bantuan.
3. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam PKH.
4. Menjelaskan sanksi serta implikasi apabila peserta tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program.
5. Menjelaskan mekanisme prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH.
6. Membantu peserta mengisi formulir klarifikasi data (perbaiki data pribadi peserta)

7. Mengumpulkan semua formulir klarifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani perjanjian kesediaan peserta PKH mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program.
8. Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH (berdasarkan kelompok yang sudah dibuat sebelum pertemuan), dan memfasilitasi pemilihan ketua kelompok.
9. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah bagi setiap peserta PKH Pendidikan.
10. Bekerjasama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas, menjelaskan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi setiap peserta PKH kesehatan.
11. Menjelaskan kewajiban ketua kelompok dalam PKH.

Hasil yang didapatkan dilapangan bahwa dalam memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program PKH yaitu diberikan pendamping. Tugas seorang pendamping adalah memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui. Pendamping bertugas memberikan penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan program agar bantuan yang diterima tidak dihentikan.

Hasil dilapangan dijelaskan bahwa program PKH diberikan karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi anak-anak keluarga sangat miskin. PKH dimaksudkan untuk membantu keluarga sangat miskin memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian generasi berikutnya diharapkan menjadi lebih berpendidikan, dan akhirnya terlepas dari kemiskinan. Tujuan diberikan program PKH untuk pendidikan

siswa dan siswi dan meningkatkan mutu pendidikannya, namun yang terjadi dilapang dengan adanya program PKH tidak berdampak kepada prestasi siswa di mana untuk sekarang ini tidak ada murid prestasi yang mendapatkan PKH, untuk saat ini dengan adanya program PKH hanya berimbas kepada banyak murid yang sudah rajin sekolah kerana takut dengan sanksi yang diberikan oleh PKH, di mana jika siswa dan siswi sering libur sekolah maka akan dipotong uang PKH yang diberikan.

Hasil pantuan penulis didapatkan bahwa untuk anak yang mendapatkan program PKH diberikan pendamping dengan tujuan dapat memberikan berbagai bimbingan kepada para siswa agar bisa meningkatkan mutu pendidikan, namun yang terjadi dilapangan pendamping selama ini tidak memberikan arahan kepada para penerima program PKH, para pendamping hanya mengarahkan pada saat pengambilan uang, selama ini juga tidak pernah ada evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh para pendamping, yang membuat program ini belum berjalan maksimal.

4.2.2 Kendala Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan

kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai persyaratannya RTSM diwajibkan memenuhi berbagai syarat yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Untuk mendukung PKH, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian Sosial telah membentuk Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen PKH berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan tersedia Pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial Pendamping PKH, yang direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi sosial masyarakat. Pada umumnya, para Pekerja Sosial pendamping PKH ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana, bahkan ada beberapa berkualifikasi sarjana strata 2. Tugas utama para Pekerja Sosial Pendamping PKH ini adalah untuk mendampingi RTSM peserta PKH dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-15 tahun dan berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun dengan syarat harus terdaftar di sekolah

formal, informal atau non formal serta kehadirannya di sekolah sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Jika anak usia 7-18 tahun tersebut tidak terdaftar di sekolah formal, informal atau non-formal karena alasan yang tidak bisa diatasi oleh orang tuannya, maka keluarga ini tetap berhak menerima bantuan asalkan terus berusaha memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang sesuai paling tidak untuk tahun berikutnya. Peran pendamping dalam hal ini adalah membantu keluarga tersebut mendaftarkannya sesegara mungkin, meskipun anak tersebut baru bisa mengikuti pendidikan pada tahun berikutnya, namun juga untuk kehadirannya harus 85%. Ini merupakan ketentuan seharusnya dalam penerimaan program PKH.

Hasil dilapangan menjelaskan bahwa program PKH terdapat berbagai kendala didalamnya di mana program keluarga harapan tidak tepat sasaran, masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun menerima bantuan PKH sedangkan masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan tersebut, dan juga pendataan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH yang sering berpindah tempat yang menjadi kendala dalam implementasi PKH di Kecamatan Payabakong, untuk melihat apakah masyarakat tersebut masih menggunakan atau tidak menggunakan bantuan tersebut lagi. Kendala lain yang didapat dilapangan bahwa pendamping tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anak yang mendapatkan bantuan PKH, pendamping hanya dilakukan pada saat pemberian dana di kantor pos tidak ada pertemuan yang berkelanjutan dengan para pihak pendamping.

Hasil lain yang didapatkan dilapangan tidak meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya masih

kurangnya fasilitas sekolah dipedesaan dimana infrastruktur sekolah di desa masih minim, kurangnya SDM guru sehingga sekolah tersebut belum berkualitas, kurangnya dorongan orang tua untuk belajar sebab anak tersebut harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan yang menjadi anak tidak sempat untuk belajar serta jarak tempuh antara rumah siswa dan sekolah karena tidak ada disediakan bus sekolah, selain itu dana yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk para pelajara membeli sepeda dalam bersekolah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z, di mana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat, selain itu untuk berjalannya program tersebut pemerintah memberikan 2 pendamping di setiap kecamatan, namun yang terjadi dengan bantuan peningkatan pendidikan belum berdampak pada prestasi siswa dan siswi, tidak ada siswa dan siswi memiliki nilai tinggi yang mendapatkan PKH hal ini dikarenakan siswa siswi hanya rajin sekolah karena takut dikenakan sanksi dipotong uang yang diberikan oleh pemerintah.
2. Kendala implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z, di mana data yang diberikan untuk program PKH tidak tepat sehingga ada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan PKH sedangkan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan program tersebut, pendataan masyarakat yang sering berpindah-pindah, dan pendamping selama ini tidak melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anak sekolah dalam hal peningkatkan pendidikan, selain itu

juga jarak tempuh siswa dengan sekolah yang jauh serta masih sangat kurangnya pengetahuan orang tua terkait dengan program PKH untuk meningkatkan mutu pendidikan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian adalah :

1. Seharusnya pemerintah memberikan pemahaman kepada para pendamping untuk selalu mendampingi para siswa dalam satu bulan sekali sesuai dengan aturan, dan pemerintah harus melakukan penegasan dan memberikan sanksi kepada para pendamping yang tidak melakukan sosialisasi dan pembinaan satu bulan satu kali.
2. Pendamping dan aparatu Desa sangat berperan untuk mengusulkan bagi yang tidak mendapatkan dana PKH sehingga bisa diusulkan pada UPPKH, serta pemerintah harus mengevaluasi kebijakannya dalam penanggulangan kemiskinan supaya penerima PKH dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang RTSM dan membutuhkan data yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta
- Dunn, William N. 1998. Muhadjir Darwin (Penyunting). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edward Sallis. (2006). *Total Quality Management In Education (alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi)*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Hadis, Abdul dan Nurhayati. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Indiahono Dwiyanto, (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamika Policy Analisis*, Yogyakarta:Gava Media.
- Islamy, Irfan M. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho D Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Rohman, Arif, (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang. Mediatama

- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Santoso, Purwo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Subarsono, (2010), *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: University Press
- Sudarwan Danim,(2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno, (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan* , Yogyakarta : BPFPE.
- Syafiie, Kencana Inu (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tachan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI dan Puslit KP 2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Usman, Husaini, Prof.Dr. (2009). *Manajemen: Teori Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab Abdul, Solichin, (2007). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. (2001). *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Public: Teori dan Proses*: Jakarta, PT. Buku Kita

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RTSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini PKH masih belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X khususnya dan Kabupaten Z pada umumnya jumlah penerima bantuan pendidikan PKH di kecamatan X adalah 1.262 orang sedangkan jumlah anak didik yang ada usia wajib belajar adalah 15.381 orang, akan tetapi yang terjadi PKH yang diberikan oleh pemerintah belum meningkatkan mutu bagi pendidikan anak, walaupun pemerintah telah memberikan pendamping kepada anak yang mendapatkan PKH, namun dilapangan belum terlaksanakan dengan baik, pendamping hanya ada pada saat memberikan dana dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z, di mana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat, selain itu untuk berjalannya program tersebut pemerintah memberikan 2 pendamping di setiap kecamatan, namun yang terjadi dengan bantuan peningkatan pendidikan belum berdampak pada prestasi siswa dan siswi, tidak ada siswa dan siswi berprestasi yang mendapatkan PKH hal ini dikarenakan siswa siswi hanya rajin sekolah karena takut dikenakan sanksi yaitu dipotong uang yang diberikan oleh pemerintah. Kendala implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan X Kabupaten Z, di mana data yang diberikan untuk program PKH tidak tepat sehingga ada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan PKH sedangkan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan program tersebut, pendataan masyarakat yang sering berpindah-pindah, dan pendamping selama ini tidak melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anak sekolah dalam hal peningkatan pendidikan, selain itu juga jarak tempuh siswa dengan sekolah yang jauh serta masih sangat kurangnya pengetahuan orang tua terkait dengan program PKH untuk meningkatkan mutu pendidikan anak.



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu - Aceh Utara
email: sefabumipersada@gmail.com
Telp. 085260363550

ISBN 978-623-7648-15-4

